

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Atik Rahmawati, *et. All., Paradigma Negara Kesejahteraan Kebijakan Sosial Berkelanjutan, Pembangunan Inklusi, dan Keadilan Sosial*, (Malang: Intrans Publising, 2021)
- Augustinus Simanjuntak, *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integrasi antara Hukum dan Praktik Bisnis*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2023)
- Dekan Fakultas Hukum UPH, *Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan No: 008/SKD/FH-UPH/VIII/2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penulisan Tugas Akhir Tesis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan*, (Karawaci, Tangerang: Universitas Pelita Harapan, 2022),
- Ellydar Chaidir, *et.all., Hukum Tata Negara Indonesia*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021)
- Fakhry Amin, *et.all., "Ilmu Perundang-undangan"*, (Kab. Serang: PT Sada Kurnia Pustaka)
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum, diterjemahkan dari karya Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory*, (Bandung: Nusa Media, 2015)
- Heryandi, *et.all., "Harmonisasi dan Sinkronisasi Pengaturan Perencanaan Pembangunan Desa di Wilayah Pesisir Lampung"*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019)
- Laurensius Arliman S, *Ilmu Perundang-undangan Yang Baik untuk Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016)
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018)
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2023)
- Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)
- Patrice. M. Rondonuwu, *Teori Hukum dari Eksistensi ke Rekonstruksi*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2021)

Pung Karnantohadi, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2020)

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)

Sedarmayanti, *et.all*, *Administrasi Pembangunan Kontemporer di Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2022)

#### **JOURNAL INTERNATIONAL/JURNAL NASIONAL**

Adinda Margareta, “Konsep Welfare State Dalam Sistem Hukum Administrasi Negara”, Researchgate Publication, 29 October 2019

Ainun Mardiyah, *et.all*, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Online Terhadap Pelaku Usaha Sebagai Korban”, E-Journal Universitas Negeri Surabaya

Bivitri Susanti, “Menyoal Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, Jurnal Jentera Volume1 No. 2 Tahun 2017

Dinartika Arnedo Nurristi, *et.all*, *Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah dengan Pembangunan Jalan Tol Berbasis Sustainable Development*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 2021, Vol. 7, No. 3, pp 399-407, 2021

D.A.A. Nilna Munaa., *et. All*, “Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Sebagai Pelayanan Perizinan Usaha Mikro dan Kecil Berbasis Elektronik di Kota Semarang”, *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 12, no. 1, Dec. 2022.

Elviandri, *dkk*, “Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi *Welfare State* Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia”, Jurnal UGM, Vol. 31, No. 2, 2019.

Indah Cintia, *et.all*, “Urgensi Sinkronisasi dan Harmonisasi Perancangan PeraturanPerundang-Undangan Daerah”, ResearchGate [https://www.researchgate.net/publication/325473140\\_URGensi\\_SINKRONISASI\\_DAN\\_HARMONISASI\\_PERANCANGAN\\_PERATURAN\\_PERUNDANGAN-UNDANGAN\\_DAERAH\\_OLEH\\_INDah\\_CINTIA\\_MADINAR\\_HIMMAH\\_A%27LA\\_RUFAIDA](https://www.researchgate.net/publication/325473140_URGensi_SINKRONISASI_DAN_HARMONISASI_PERANCANGAN_PERATURAN_PERUNDANGAN-UNDANGAN_DAERAH_OLEH_INDah_CINTIA_MADINAR_HIMMAH_A%27LA_RUFAIDA), diakses pada 01 Oktober 2023.

Marilang, “Ideologi *Welfare State* Konstitusi: Hak Menguasai Negara Atas Barang Tambang”, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2019

Muhammad Iqbal Fitra Assegaf, *dkk*, “Pelaksanaan Online Single Submission (OSS) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah”, *Diponegoro Law Jurnal*, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019

Rifqy Maulana, *et.all.*, “Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan”, *Jurnal Justisia*, Vol. 3, No. 1, 2018

Rio Christiawan, “Perizinan Berbasis *Online Single Submission* Untuk Mewujudkan Kemudahan Berusaha”, *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 50 No. 1, Januari 2021

V. Hadiyono, “Indonesia dalam Menjawab Konsep Negara *Welfare State* dan Tantangannya”, *Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan*, ISSN: 2722-970X, Vol. 1, No.1, Agustus 2020

Yohanes Suhardin, “Peranan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat”, *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Juli 2007, Volume 25, No. 3

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, LN.2014/No. 4, TLN No. 5492, LL SETNEG: 58 HLM

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, LN.2007/No. 67, TLN No. 4724. LN.2014/No. 4, TLN No. 5492, LL SETNEG: 58 HLM

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN.2011/No. 82, TLN No. 5234, LL SETNEG: 51 HLM

Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara (LN.2008/No. 177, TLN No. 4925, LL SETNEG: 12 HLM)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN. 1999/ No. 22, TLN NO. 3821, LL SETNEG : 35 HLM

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, LN. 2018/No. 90, TLN No. 6215, LL Setkab: 59 hlm.

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, LN.2021/No.15, TLN No. 6617, [peraturan.go.id](http://peraturan.go.id): 349 hlm.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Peraturan Menteri Perindustrian No. 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyampaian Data Industri, Data Kawasan Industri, Informasi Industri dan Informasi Lain, Berita Negara No. 192, 2019.

Peraturan Menteri Perindustrian No. 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal

Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/Kep/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan.

#### **WEBSITE/INTERNET**

Artikel Kominfo, “Presiden: Permudah Perizinan, Perlancar Investasi”, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/12826/presiden-permudah-perizinan-perlancar-investasi/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/12826/presiden-permudah-perizinan-perlancar-investasi/0/artikel_gpr), diakses pada 27 November 2023.

Berita Industri Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, “Izin Industri Kini di BKPM”, <https://kemenperin.go.id/artikel/10684/Izin-Industri-Kini-di-BKPM>, diakses pada 15 November 2023.

Berita Kegiatan BSN, “Praktik Standar Usaha Berbasis Risiko di Inggris dan Indonesia”, <https://www.bsn.go.id/main/berita/detail/11901>, diakses pada 26 November 2023.

Berita Pembangunan, “Bappenas: Indonesia Andalkan Industri untuk Capai Pertumbuhan Ekonomi”, <https://www.bappenas.go.id/id/berita/bappenas-indonesia-andalkan-industri-untuk-capai-pertumbuhan-ekonomi-bmPfmM>, diakses pada 26 November 2023.

Berita utama Kemenko PMK, “Penerapan sistem Ekonomi Pancasila dalam Mendorong Pembangunan Manusia Indonesia”,



<https://www.kemenkopmk.go.id/penerapan-sistem-ekonomi-pancasila-dalam-mendorong-pembangunan-manusia-indonesia>, diakses pada 30 September 2023

Disperindag Daerah Istimewa Yogyakarta, “Peran Penting Pelaku Industri dalam SIINas”, <https://disperindag.jogjaprovo.go.id/v3/peran-penting-pelaku-industri-dalam-siinas-berita-8f7d807e1f53eff5f9efbe5cb81090fb.asp>, diakses pada 20 November 2023.

DPMPTSP Kabupaten Kulonprogo, “Sejumlah Hambatan yang Perlu Disempurnakan dalam OSS”, <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/543/sejumlah-hambatan-yang-perlu-disempurnakan-dalam-oss>, diakses pada 22 November 2023.

DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah, “Infografis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (4)”, <https://web.dpmptsp.jatengprov.go.id/packages/upload/portal/files/Infografis%20Perizinan%20Berusaha%20Berbasis%20Risiko.pdf>, diakses pada 17 November 2023.

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur, “Dukung keberhasilan penyelenggaraan OSS RBA, DPMPTSP Kaltim gelar bimtek pengawasan”, <https://dpmptsp.kaltimprov.go.id/single-berita/233>, diakses pada 20 November 2023.

Hukum Online, “Makna Asas Legalitas dalam Hukum Administrasi Negara”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-legalitas-dalam-hukum-administrasi-negara-cl6986/>, diakses pada 30 September 2023.

Hukum online, “Terbitkan Perppu Cipta Kerja, Begini Alasan Pemerintah”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/terbitkan-perppu-cipta-kerja--begini-alasan-pemerintah-lt63aeb25790c1e/>, 2022, diakses pada Sabtu, 20 May 2023.

Kata data, “Menelaah 5 macam Pendekatan dalam Penelitian Hukum”, <https://katadata.co.id/agung/berita/634ecdc698b51/menelaah-5-macam-pendekatan-dalam-penelitian-hukum>, (2022), diakses pada hari Minggu, 21 May 2023.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “e-government: Inovasi dalam Strategi Komunikasi”, [https://www.setneg.go.id/baca/index/e\\_government\\_inovasi\\_dalam\\_strategi\\_komunikasi](https://www.setneg.go.id/baca/index/e_government_inovasi_dalam_strategi_komunikasi), diakses pada 26 November 2023.

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, “e-government: Inovasi dalam Strategi Komunikasi”, [https://www.setneg.go.id/baca/index/e\\_government\\_inovasi\\_dalam\\_strategi\\_komunikasi](https://www.setneg.go.id/baca/index/e_government_inovasi_dalam_strategi_komunikasi), diakses pada 26 November 2023.

Kominfo, “Izin Berusaha Kini Lebih Mudah, Pemerintah Meluncurkan Sistem OSS”, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/artikel\\_gpr](https://www.kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintah-meluncurkan-sistem-oss/0/artikel_gpr), diakses pada 15 November 2023.

Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, “Evaluasi Setahun OSS studi pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 di Daerah, Laporan Final KPPOD: 2019”, [https://www.kppod.org/backend/files/laporan\\_penelitian/Evaluasi%20Setahun%20OSS-KPPOD.pdf](https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/Evaluasi%20Setahun%20OSS-KPPOD.pdf), diakses pada 22 November 2023.

Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah, “Implementasi OSS RBA di Daerah: Tantangan dan Kebutuhan Pemda”, [https://www.kppod.org/backend/files/laporan\\_penelitian/Implementasi%20OSS%20RBA%20di%20Daerah.pdf](https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/Implementasi%20OSS%20RBA%20di%20Daerah.pdf), diakses pada 25 November 2023.

Kompas.id, “Lagu Lama Kendala Izin Berusaha”, <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/01/28/lagu-lama-kendala-izin-berusaha-tematis-perppu>, diakses pada 25 November 2023.

*Online Single Submission*, “Website Resmi OSS”, <https://oss.go.id>, diakses pada 17 November 2023, *homepage*.

Sekretarian Kabinet Republik Indonesia, “Pengantar Presiden Joko Widodo pada Rapat Terbatas tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (*Online Single Submission*/OSS), 18 April 2018, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat”. <https://setkab.go.id/pengantar-presiden-joko-widodo-pada-rapat-terbatas-tentang-percepatan-pelaksanaan-berusaha-online-single-submissionoss-18-april-2018-di-istana-kepresidenan-bogor-jawa-barat/>, diakses pada 15 November 2023.

Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “Prinsip Trust but Verify dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/3158/prinsip-trust-but-verify-dalam-perizinan-berusaha-berbasis-risiko>, diakses pada 26 November 2023.

Twitter @KemenkeuRI, “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Mengusung Konsep *Trust but Verify*”, <https://twitter.com/KemenkeuRI/status/1389128225675046919>, diakses pada 26 November 2023.

Warta Pemeriksa, “Ketidaksiaran Peraturan Hambat Penerbitan Izin Berusaha OSS”, <https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=37426>, diakses pada 20 November 2023.

World Bank Group, “Doing Business 2019 Training For Reform”, <https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual->

[Reports/English/DB2019-report\\_web-version.pdf](#), 2019, diakses pada 16 Maret 2023

World Bank Group, “Ease of Doing Business in ASEAN”, [http://iaiglobal.or.id/v03/files/file\\_publicasi/EoDB%20in%20ASEAN%20Presentation\\_SAGITA%20MUCO.pdf](http://iaiglobal.or.id/v03/files/file_publicasi/EoDB%20in%20ASEAN%20Presentation_SAGITA%20MUCO.pdf), 2021, diakses pada 16 Maret 2023

Zafrullah Salim, “*Urgensi Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah*”, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, [http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/559\\_URGENSEI%20KODIFIKASI.doc](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/doc/559_URGENSEI%20KODIFIKASI.doc), diakses pada 15 Oktober 2023

## **KAMUS DAN ENSIKLOPEDIA**

*Code*, The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition copyright ©2022 by HarperCollins Publishers.

Wikipedia Bahasa Indonesia: Bahasa latin: *bonum commune*

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Kota Langsa Nisa Syahlia selaku Jabatan Fungsional Penata Perizinan Ahli Muda DPMPTSP Kota Langsa secara langsung tatap muka di Kantor DPMPTSP Kota Langsa, Provinsi Aceh pada 15 November 2023.

Wawancara dengan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda Direktorat Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, via Zoom Meeting dengan Meeting ID: 880 0173 8787, pada 09 Desember 2023, pukul 01.45 PM.

Wawancara dengan Pelaku Usaha I, Arum Nurani, Pemilik Dafoowdies, secara langsung tatap muka di Kota Langsa, Provinsi Aceh pada 15 November 2023.

Wawancara dengan Pelaku Usaha III, Hendriyanto Suhandi, Direktur PT Password Solusi Sistem, via Zoom Meeting dengan Meeting ID: 870 4893 1183, pada 23 November 2023, pukul 07.00 PM.

Wawancara dengan Pelaku Usaha II, Tri Syahputra, Pemilik Pondok Kopi, via Zoom Meeting dengan Meeting ID: 897 1355 4250, pada 18 November 2023, pukul 11.00 AM.